LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4707213, 4894834, 4892884

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

LAPORAN KEKAYAAN DAN HARTA PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan akuntabel, perlu diatur kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lapan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Laporan Kekayaan dan Harta Pejabat Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lapan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;

Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
5. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Saksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG LAPORAN KEKAYAAN DAN HARTA PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN LAPAN.

KESATU : 1. Pejabat Pengelola Anggaran yang terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Pejabat Pembuat Komitmen;
d. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
e. Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM; dan
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK.

KEDUA : Penyampaian LHKPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan melapor kembali sewaktu mengalami penggantian jabatan.

KETIGA : Untuk Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK, maka diwajibkan menyampaikan LHKPN ke KPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penyampaian LHKPN di lingkungan Lapan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Lapan Nomor Kep/034/III/2005 tentang Laporan Kekayaan dan Harta Pejabat dinyatakan masih tetap berlaku.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 MAY 2012

KEPALA,

BAMBANG S. TEJASUKMANA